



Kacamata Driyarkara adalah program kerja Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2020 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran atas isu-isu kontemporer baik di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, maupun ekonomi dari perspektif BEM USD. Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara:

Realita dan Harapan: Wajah Pendidikan Tinggi Indonesia di Tengah Pandemi

Louis IX King

Anggita Dwi Ardhani

Atthalla Syalsabhila

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, satu generasi anak-anak di seluruh dunia terganggu pendidikannya!¹ Pandemi virus corona telah menyebabkan "darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya", dengan 9,7 juta anak yang terkena dampak penutupan sekolah berisiko putus

¹ BBC News, "Pendidikan anak: Hampir 10 juta anak 'berisiko putus sekolah permanen' akibat pandemi Covid-19, kata badan amal", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53385718> pada 12 September 2020 pukul 21.15 WIB

sekolah secara permanen, kata lembaga amal *Save the Children*.² Mereka mengutip data UNESCO yang menunjukkan bahwa pada bulan April 2020, 1,6 miliar pelajar diliburkan dari sekolah dan universitas karena langkah-langkah untuk menekan penyebaran Covid-19. Angka tersebut merupakan sekitar 90% dari seluruh populasi pelajar di dunia.

Sedangkan di Indonesia sendiri telah banyak anak yang putus sekolah sejak merebaknya pandemi virus Covid-19 di tanah air. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan banyak siswa mengalami tekanan secara psikologis hingga putus sekolah karena berbagai masalah yang muncul selama mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring di masa pandemi virus corona (Covid-19). Mayoritas dari mereka tidak bisa mengakses pembelajaran daring.³ Walaupun tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah pelajar yang putus sekolah sejak pandemi, pemerintah seharusnya dapat mewaspadai hal tersebut dengan menyiapkan pencegahan-pencegahan strategis, seperti evaluasi PJJ yang sedang berjalan, atau mengintervensi kondisi para pelajar yang kesulitan mengakses Pembelajaran Jarak Jauh dengan memberikan bantuan tepat sasaran.

Lantas apa saja kunci dasar untuk menjamin mutu pendidikan yang baik di tengah pandemi?

² Save The Children, “Almost 10 Million Children May Never Return To School Following Covid-19 Lockdown”, diakses dari <https://www.savethechildren.net/news/almost-10-million-children-may-never-return-school-following-covid-19-lockdown> pada 12 September pukul 22.07 WIB

³ AGA, “KPAI: Banyak Siswa Stres Hingga Putus Sekolah karena Belajar Daring”, diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb10xmXN-kpai-banyak-siswa-stres-hingga-putus-sekolah-karena-belajar-daring> pada 12 September

Mutu Pendidikan di Tengah Pandemi

Pemerintah Indonesia, khususnya Kemendikbud perlu mempertimbangkan tiga aspek vital untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak memperluas kesenjangan sosial, memperdalam ketimpangan kualitas pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi dan membuat kelompok marginal makin terpinggirkan.

Menurut Whisnu Triwibowo, tiga aspek digital tersebut adalah ketersediaan infrastruktur digital, keterampilan digital, dan karakteristik teknologi. ⁴

1) Ketersediaan infrastruktur digital

Indonesia saat ini belum menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), prasyarat utama untuk pembelajaran jarak jauh, yang memadai dan meluas untuk seluruh warganya.

Data *International Telecommunication Union* (ITU) dan Biro Pusat Statistik (BPS) terbaru menggambarkan kurang dari 40 persen penduduk Indonesia yang menjadi pengguna internet. Di sisi lain, hanya 3 persen yang secara reguler mendapatkan akses internet pita lebar yang cepat.

Akses pita lebar internet menjadi elemen penting dalam PJJ karena metode pembelajaran menggunakan metode audio-visual yang membutuhkan kapasitas sambungan besar. Bahkan di Ibu kota Jakarta, belum semua penduduknya dapat menikmati sambungan internet pita lebar, terutama yang belum menggunakan sambungan kabel optik.

Hampir semua operator telepon selular di Indonesia memang sudah menawarkan sambungan 4G LTE, tapi kualitas sambungan yang tidak selalu stabil masih menjadi kendala besar. Sekalipun terdapat akses internet cepat, tidak semua penduduk bisa membeli akses tersebut.

Menurut data BPS, jumlah pengguna telepon selular mencapai lebih dari 100 persen, namun hanya 20 persen penduduk Indonesia yang memiliki komputer, medium yang ideal untuk kegiatan belajar mengajar karena karakteristiknya yang memungkinkan penggunaan beragam aplikasi yang mendukung proses pembelajaran.

⁴ Whisnu Triwibowo, "Kuliah Online Berisiko Menurunkan Mutu Pembelajaran Mahasiswa Miskin di Indonesia", diakses dari https://www.vice.com/id_id/article/m7qd5x/kuliah-online-berisiko-menurunkan-mutu-pembelajaran-mahasiswa-miskin-di-indonesia pada 13 September 2020 pukul 09.07 WIB

Faktor ekonomi menjadi penghambat adopsi komputer di negara berkembang ketika penduduk tidak mampu membelinya.

2. Keterampilan digital: problem peserta didik dan pengajar

Keterampilan digital menjadi faktor penting lainnya untuk memahami kesenjangan digital. Kompetensi dan literasi dalam menggunakan komputer dan berselancar di dunia maya menjadi keterampilan dasar yang dibutuhkan.

Sebuah studi di Amerika Serikat menggambarkan bahwa keterampilan digital terkait erat dengan generasi dan usia. Generasi milenial dianggap lebih adaptif dan terampil menggunakan teknologi digital ketimbang generasi orang tuanya.

Kesenjangan generasi yang berkorelasi dengan keterampilan digital bisa termanifestasi dalam PJJ, ketika guru atau dosen yang gagap teknologi tidak akan mampu mengelola pembelajaran. Selain itu, status sosio-ekonomi pengguna juga mempengaruhi tingkat kompetensi dan literasi dalam menggunakan TIK.

Peserta didik yang berasal dari kalangan kurang mampu sangat mungkin tidak memiliki komputer atau sambungan internet, sehingga mengalami keterbatasan akses fisik dan material teknologi digital. Walaupun mereka berasal dari generasi *digital native*, keterampilan digital smereka akan lebih rendah dibandingkan siswa dari keluarga yang lebih berada.

Jadi ada keterkaitan erat antara kesenjangan sosial, ketersediaan akses, dan keterampilan digital. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi kualitas PJJ dan membuat kesenjangan digital menjadi masalah multidimensi.

3. Karakteristik teknologi: kegamanan dalam pengadopsian teknologi

Ketersediaan beragam aplikasi yang dapat digunakan dalam PJJ, seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan Line telah menimbulkan tantangan baru. Setiap aplikasi mempunyai karakteristik khusus yang akan mempengaruhi interaksi antara mahasiswa dan dosen. Kekhawatiran utama adalah dampak dari aplikasi tersebut terhadap kualitas hasil pembelajaran.

Aplikasi seperti Zoom yang memiliki fitur lebih kaya dan interaktif tentu akan memberikan hasil yang lebih baik ketimbang medium WhatsApp. Pengajar harus memahami karakteristik

teknologi yang digunakan dalam PJJ, terutama terkait pengetahuan atas kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan.

Pembuatan materi pengajaran tentu akan mengacu kepada kapasitas dan kapabilitas dari medium yang digunakan. Teori kesempurnaan media (*media richness*) menggambarkan bahwa interaksi tatap muka menjadi medium paling kaya yang dapat mereduksi keambiguan penyampaian pesan. Media digital memiliki keterbatasan dalam memberikan isyarat non-verbal dan juga kecepatan umpan balik yang dapat mengganggu komunikasi selama pembelajaran.

Perubahan metode tatap muka di kelas menjadi termediasi via layar laptop membutuhkan adaptasi dan perubahan, terutama dari sisi penyiapan materi dan interaksi dalam ruang maya. Pengajar yang tidak memiliki keterampilan digital dan pengetahuan atas karakteristik teknologi yang memadai akan terhambat sehingga tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Tantangan ini juga dialami oleh peserta didik yang belum terbiasa dengan ragam aplikasi pembelajaran yang akan digunakan. Keterbatasan sumber daya ekonomi menciptakan kesenjangan digital di kalangan milenial, terutama terkait penggunaan ragam aplikasi.

Siswa yang memiliki kemampuan finansial lebih bisa bereksplorasi dengan internet dan aplikasinya sehingga sudah terbiasa dan bisa cepat beradaptasi. Sedangkan siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, akan tertinggal.

PJJ Mempertajam Kesenjangan

Dalam studi terbaru Jan van Dijk dari Universitas Twente Belanda tentang kesenjangan digital, ada keterkaitan antara kesenjangan sosial dengan ketersediaan akses terhadap internet dan keterampilan digital.

Keterbatasan akses fisik dan material terhadap TIK di kalangan mahasiswa dari kelompok menengah ke bawah berdampak pada rendahnya kompetensi dan literasi digital yang mempengaruhi kemampuan mereka memaksimalkan penggunaan aplikasi dalam PJJ. Hal ini membuat PJJ bisa memperdalam kesenjangan sosial.

Harus ada evaluasi formatif selama proses PJJ berlangsung – kita tidak tahu persis kapan wabah coronavirus ini akan berakhir – dan intervensi bisa cepat dilakukan ketika terjadi indikasi yang tidak sesuai harapan.

Pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengawasi proses ini dan bila perlu merevisi di tengah jalan untuk memperbaiki kekurangan, terutama terkait ketersediaan akses dan keterampilan digital.⁵

Sudah banyak contoh kasus yang menjelaskan betapa lebarnya ‘gap’ antara masyarakat kelas ke menengah, dan masyarakat kelas bawah. Kesenjangan ekonomi yang sudah ada sejak dulu diperparah oleh hadirnya pandemi dalam kehidupan manusia sekarang ini. Sebut saja kisah mahasiswa NTT yang kesulitan kuliah online karena tak punya ponsel.⁶ Sekilas kisahnya: Fortunatus Roland Lamanepa (20), mahasiswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kesulitan mengikuti proses kuliah secara online. Mahasiswa semester III Progam Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Jurusan Perikanan Kelautan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, itu tidak memiliki telepon seluler (ponsel) untuk kuliah online. Ponselnya sudah rusak sebelum adanya perkuliahan online. Ia pun terpaksa meminjam ponsel tetangga dan teman untuk mengikuti perkuliahan online.

Namun, ia harus mengisi pulsa data guna memperlancar proses kuliah online tersebut. Sejak saat itu, ia sudah berapa kali tidak mengikuti kuliah online karena tidak memiliki uang untuk mengisi pulsa data serta belum bisa memperbaiki ponselnya yang rusak. Ada niat untuk mengkredit ponsel. Namun, kehidupan keluarganya memprihatinkan. Roland tinggal dengan ayahnya, Aloysius Lamanepa (58), di lahan kosong di RT 013 RW 008 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT. Ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan sudah dua tahun menderita sakit diabetes. Penyakit itu menyebabkan kaki kanan sang ayah luka dan bengkak serta sulit disembuhkan. Mereka menempati rumah semipermanen yang dibuat berpetak-petak menjadi tiga kamar. Sang ibu, Rofina Nage, sudah meninggal dunia sejak tahun

⁵ Ibid.

⁶ Sigiranus Marutho Bere, “Kisah Mahasiswa NTT Kesulitan Kuliah Online karena Tak Punya Ponsel”, diakses dari <https://kupang.kompas.com/read/2020/05/12/09441351/kisah-mahasiswa-ntt-kesulitan-kuliah-online-karena-tak-punya-ponsel?page=all> pada 13 September 2020 pukul 18.46 WIB

2011 saat masih aktif menjadi guru di SMPN 1 Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Roland dan sang ayah kemudian hijrah ke Kota Kupang sejak tahun 2014.

Sehari-hari mereka mengandalkan uang pensiun sang ibu yang diterima setiap bulan Rp 1,6 juta. Dari uang ini, Rp 600.000 dipakai untuk kredit sepeda motor karena jarak kampus dan rumah cukup jauh. Terkadang, mereka mendapat bantuan dari tetangga untuk makan sehari-hari. Tetangga pun rutin membantu Aloysius Lamanepa untuk ke rumah sakit mengobati sakit diabetes yang dideritanya. Roland sempat cemas karena sudah beberapa kali tidak mengikuti perkuliahan online.

Semuanya menjadi lebih baik setelah pada akhirnya Roland dibantu oleh seorang Polisi yang merasa iba dan kemudian memberikan sebuah ponsel kepadanya.⁷ Ronald hanyalah satu contoh mahasiswa yang kisahnya bisa diceritakan.

Kisah lain adalah tentang seorang Ayah di Garut yang mencuri ponsel demi keberlangsungan belajar online sang anak.⁸ Seorang ayah di Garut, Jabar, nekat mencuri ponsel pintar milik majikannya. Alasannya, karena sang ayah tak ingin putri kesayangannya tertinggal belajar. Pria berinisial A, asal Tarogong Kaler pekerja buruh tani nekat mencuri sebuah *handphone* milik orang yang dia kenal.

A bercerita terkait kejadian tersebut. Kejadian bermula saat satu dari tiga orang putranya yang duduk di bangku kelas satu sekolah menengah tak bisa ikutan belajar daring dengan teman-teman karena tidak memiliki ponsel pintar. Anaknya itu kerap meminta A untuk dibelikan HP agar dia bisa belajar bersama teman-temannya via daring. A mengaku tak mampu memenuhi keinginan anaknya itu.

Penghasilan yang kecil sebagai buruh tani membuat A berniat mencuri. Sejak saat itu, terbesit di pikiran A untuk mengambil jalan pintas. Dia hendak mencuri HP. Seorang pria yang dia kenal yang kerap memintanya memperbaiki peralatan rumah dipilih jadi sasaran. Dia curi-curi kesempatan masuk ke rumah majikan itu, lalu mengambil Sebuah HP dari dalam rumah.

⁷ Ibid.

⁸ Hakim Ghani. "Kronologi Ayah di Garut Curi Ponsel demi Anak Belajar Online", diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5120658/kronologi-ayah-di-garut-curi-ponsel-demi-anak-belajar-online> pada 13 September 2020 pukul 20.57 WIB

Itulah dua contoh dari dampak kesenjangan ekonomi yang merambat sampai ke pendidikan. Sudah saatnya, pemerintah turun tangan untuk membantu kalangan masyarakat bawah agar dapat mengakses pendidikan daring di tengah pandemi dengan baik dan bermutu.

Intervensi Pemerintah untuk Pendidikan di Tengah Pandemi

Salah satu sektor yang paling terdampak pandemi corona adalah pendidikan. Terkait hal tersebut, pemerintah lewat Kemendikbud mengeluarkan beberapa kebijakan pendidikan di masa pandemi ini. Berikut merupakan beberapa kebijakan pemerintah terkait pendidikan di tengah pandemi :

1. Pembelajaran Jarak Jauh (Daring)

Proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), pembelajaran jarak jauh ini merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh kemendikbud pasca pandemi covid-19.

Seperti yang kita ketahui kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring ini dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, dimana semua anak sekolah dan mahasiswa mulai belajar dari rumah masing-masing tanpa perlu pergi ke sekolah atau kampus. Berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh atau daring maka penting sekali penguasaan teknologi bagi guru atau dosen. Para guru dan dosen harus melakukan inovasi dalam pembelajaran di antaranya dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Semenjak pembelajaran diberlakukan di rumah, sebagai para pengajaran melakukan pembelajaran lewat media online seperti WhatsApp, google meet, google form, zoom, dll.⁹

Sistem PJJ yang sudah dilaksanakan kurang lebih 6 bulan ini seharusnya tak menjadi beban bagi para orang tua, mahasiswa, maupun dosen. PJJ yang menjadi alternatif utama setelah penutupan sekolah dan perguruan tinggi ini terkesan tidak disiapkan secara matang baik dari prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM). Persoalan teknis terkait PJJ ialah

⁹ Salwa Aulia, "Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi", diakses dari <https://www.suara.com/yoursey/2020/07/20/175556/pembelajaran-daring-pada-masa-pandemi> , pada tanggal 13 September 2020 puku 16.00 WIB

dimana jaringan internet yang belum merata, sehingga banyak sekali kasus mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan karena minimnya jaringan internet.

Kemudian juga pemerintah perlu memperhatikan sistem perguruan tinggi yang memberikan tugas sebagai pengganti kegiatan belajar mengajar dalam PJJ ini. Perlu diketahui bahwa pemberian tugas yang berlebihan sangat menyulitkan bagi para siswa maupun mahasiswa, pemberian tugas yang berlebihan memeberikan dampak negatif bagi para pelajar seperti stres dan kesehatan, khususnya kesehatan mata.

Di tengah kondisi serbasulit ini, sudah seharusnya pula tak ada kenaikan uang kuliah. Kita berharap negara hadir dan memastikan seluruh anak bangsa tetap bisa menikmati pendidikan berkualitas yang terjangkau.

2. *Subsidi Kuota Gratis dari Kemendikbud*

Kegiatan belajar mengajar hingga saat ini masih dilaksanakan di rumah secara daring. Banyak siswa, orang tua serta guru yang mengeluhkan biaya internet yang mahal karena kebijakan ini. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama empat bulan. Diketahui, siswa akan mendapatkan 35 GB per bulan, sementara guru akan mendapatkan 42 GB per bulan. Tak hanya guru dan siswa, bantuan ini juga didapatkan oleh Perguruan Tinggi, di mana dosen dan mahasiswa akan mendapatkan masing-masing 50 GB per bulan.

Anggaran yang dicanangkan Nadiem Makarim ini diketahui berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud didukung oleh anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020 dengan total anggaran Rp8,9 triliun. Subsidi bantuan kuota akan mulai diberikan dari bulan September hingga Desember 2020.¹⁰

Mengingat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi kuota cukup besar, maka penyaluranya harus tepat sasaran. Bukan hanya memberikan kuota internet secara merata,

¹⁰ Annisa Fauziah, "Subsidi Kuota Gratis dari Kemendikbud Cair Bulan September", diakses dari <https://depok.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-09709577/subsidi-kuota-gratis-dari-kemendikbud-cair-bulan-september?page=2> , pada tanggal 13 September 2020 pukul 12.00 WIB

tetapi juga memperhatikan kualitas jaringan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

3. Bantuan Pandemi bagi Mahasiswa

Di tengah pandemi, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk membantu para mahasiswa khususnya para mahasiswa yang mempunyai kesulitan di bidang ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan bantuan bagi mahasiswa di tengah pandemi. Pemberian bantuan di tengah pandemi bagi mahasiswa saat ini mengalami peningkatan. Tercatat penambahan jumlah penerima bantuan akan diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa (terutama Perguruan Tinggi Swasta) di luar 467.000 mahasiswa yang menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi dan KIP Kuliah. Dana Bantuan Pandemi ini dikhususkan bagi mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi dan juga mahasiswa yang memenuhi kriteria-kriteria khusus dari pemerintah seperti berikut :

- Mahasiswa yang mengalami Kendala finansial: orang tua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020
- Status beasiswa: tidak sedang dibiayai program KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT secara penuh maupun sebagian;
- Jenjang Kuliah: mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan semester ganjil tahun 2020.

Dana KIP Kuliah Reguler tahun 2020 tetap diberikan untuk 200.000 mahasiswa baru yang menjalankan semester 1 di tahun 2020. Adapun dana Bidikmisi tetap dilanjutkan bagi mahasiswa yang melanjutkan studi di tahun 2020 dan tetap menjalankan program Afirmasi Pendidikan Tinggi dengan sasaran 267.000 mahasiswa.¹¹

¹¹ Pengelola Web Kemdikbud, “Kemendikbud Luncurkan Tiga Kebijakan Dukung Mahasiswa dan Sekolah Terdampak COVID-19”, diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/06/kemendikbud-luncurkan-tiga-kebijakan-dukung-mahasiswa-dan-sekolah-terdampak-covid19> , pada tanggal 13 September 2020 pukul 15.14 WIB

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan Indonesia mengalami kenaikan Rp140 triliun dalam empat tahun terakhir. Saat ini, anggaran pendidikan sekitar Rp508 triliun.¹²

4. Kebijakan Penyesuaian UKT

Kemendikbud mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19. Terdapat empat arahan kebijakan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut yaitu:

- 1) UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19;
- 2) Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester (SKS) sama sekali (misalnya: menunggu kelulusan);
- 3) Pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.
- 4) Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50 persen UKT jika mengambil ≤ 6 SKS.
 - Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (SI,D4)
 - Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3).

Menurut Mendikbud, melalui kebijakan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan berbagai manfaat, yaitu keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di masa akhir kuliah.

Penurunan UKT terus dilakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri

¹² Faorick Pakpahan, "Pandemi Covid-19, Pemerintah Tidak Potong Anggaran Pendidikan", diakses dari <https://edukasi.sindonews.com/read/21175/144/pandemi-covid-19-pemerintah-tidak-potong-anggaran-pendidikan-1588910718>, pada tanggal 14 September 2020 pukul 17.00 WIB

Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Gorontalo. Proses penurunan UKT telah disepakati dan dalam pelaksanaan oleh seluruh PTN.¹³

Gerak cepat pemerintah dalam menyikapi berbagai isu dibidang pendidikan khususnya kebijakan penyesuaian UKT pada Perguruan Tinggi Negeri memang layak kita apresiasi. Namun juga seharusnya bukan menjadi alasan bahwa Perguruan Tinggi Swasta tidak perlu dibantu.

Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Tengah Pandemi

Berbagai masalah timbul di sektor pendidikan selama pandemi ini. Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menyebutkan jaringan internet menjadi kendala utama pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring selama pandemi Covid-19. Kajian dilakukan pada 1.304 responden meliputi guru, siswa, serta orang tua di tingkat SMP-SMA di 5 kabupaten/kota DIY. Survei dilakukan via *google form* sejak 25 Juni - 1 Juli 2020.¹⁴

Berikut adalah garis besar hasil risetnya:

- Lebih dari 50 persen responden mengeluhkan tentang jaringan ini terutama di Kulonprogo dan Gunung Kidul.
- Banyak dikeluhkan keterbatasan biaya untuk mengakses internet.
- Keterbatasan waktu orang tua dalam mendampingi anak saat mengikuti pembelajaran jarak jauh.
- Keterbatasan keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh para guru.
- Siswa mengaku materi pembelajaran jarak jauh lebih sulit daripada tatap muka.¹⁵

¹³ Galuh Alkalis, "Kebijakan Pemerintah Untuk Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi", diakses dari <https://www.portonews.com/2020/covid-19/kebijakan-pemerintah-untuk-pendidikan-indonesia-di-tengah-pandemi/> , pada tanggal 15 September 2020 pukul 07.54 WIB

¹⁴ Syafril Amir, "Pakar UGM: Jaringan Internet Kendala Utama Pembelajaran Jarak Jauh", diakses dari <https://haluan.co/article/pakar-ugm-jaringan-internet-kendala-utama-pembelajaran-jarak-jauh> , pada tanggal 13 September 2020 pukul 21.13 WIB

¹⁵ Ibid.

Sedangkan berikut adalah rekomendasi alternatif yang bagi beberapa permasalahan di atas:

- Pemerintah perlu mengusahakan jaringan internet yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia.
- Menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan operasional penyelenggaraan pembelajaran jauh di level pendidikan dasar menengah dengan memperkuat kreativitas guru.
- Kebijakan pendidikan pembelajaran jarak jauh antara online dan offline sebagai alternatif masa new normal.
- Pembelajaran tatap muka dapat dimulai ketika lingkungan sekolah dinyatakan aman dan ada kesepakatan dengan para pemangku kepentingan

Tak ayal, pemeralihan moda belajar dari tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan satu-satunya opsi yang tersedia dibandingkan tidak adanya aktivitas belajar mengajar sama sekali. Pemerintah pun sudah sebisa mungkin memberikan kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa membantu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini. Adapun alternatif yang ditunjukkan kepada pemerintah sebagai masukan untuk membuat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini semakin lebih baik setiap harinya:

- KPAI mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera membuat kebijakan yang menggratiskan internet selama PJJ. Minimal enam bulan ke depan. Karena banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet

- KPAI mendorong adanya kebijakan pemerintah yang fokus pada keluarga miskin. Hal ini untuk mencegah krisis kesehatan menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak-anak. Seharusnya pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Anak-anak yang tidak bisa mengakses PJJ secara daring berpotensi berhenti

sekolah. Padahal pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara dalam kondisi apapun.¹⁶

Setelah mendapat berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk KPAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud) menggandeng perusahaan telekomunikasi untuk membantu penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk semester depan, seperti XL untuk menyediakan akses internet gratis atau berbiaya murah bagi dosen dan mahasiswa. Tak hanya itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi dosen atau civitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan materi atau konten pembelajaran daring secara berkelanjutan juga dilakukan, kesempatan untuk menyelenggarakan program pengakuan kredit antara universitas melalui pembelajaran daring serta pemanfaatan *MOOC's international*.¹⁷

“Kerja sama ini membantu mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan PJJ,” ujar Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof Nizam saat penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Dikti dan XL Axiata secara daring.¹⁸

¹⁶ Ind, “Guru dan Siswa Miskin Terkendala Gawai Saat PJJ, Begini Saran KPAI untuk Pemerintah”, diakses dari <https://bizlaw.id/read/26733/Guru-dan-Siswa-Miskin-Terkendala-Gawai-Saat-PJJ-Begini-Saran-KPAI-untuk-Pemerintah> , pada tanggal 13 September 2020 pukul 16.33 WIB

¹⁷ Fitria Larasati, “Strategi dan Kebijakan Ditjen Dikti Terhadap Keberlanjutan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Hadapi Pandemi Covid-19” diakses dari <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2020/06/06/strategi-dan-kebijakan-ditjen-dikti-terhadap-keberlanjutan-pendidikan-tinggi-di-indonesia-dalam-hadapi-pandemi-covid-19/> , pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.54 WIB

¹⁸ Ati, “Solusi Pembelajaran Jarak Jauh, Ditjen Dikti Gandeng XL” diakses dari <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/solusi-pembelajaran-jarak-jauh-ditjen-dikti-gandeng-xl/2/> , pada tanggal 15 September 2020 pukul 12.27 WIB

SIKAP BEM USD

Maka dari itu, berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2020 menyatakan sikap untuk:

1. Mendukung segala kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk terus mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban pendidikan mahasiswa sepanjang pandemi
2. Mendorong pemerintah Indonesia untuk selalu melakukan evaluasi berkala atas kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia agar semakin bermutu dalam penerapannya
3. Menuntut pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud untuk juga memperhatikan kondisi mahasiswa-mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah pandemi agar terciptanya visi pendidikan yang berkeadilan

